

Dinamika Fungsi Masjid di Indonesia: Dari Lokus Pengajaran Islam Ke Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat

Mustain

Universitas Islam Negeri Mataram, NTB, Indonesia

email: mustain@uinmataram.ac.id

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi evolusi fungsi masjid, menelusuri perkembangannya dari Zaman Keemasan Islam di Timur Tengah hingga pengaruhnya terhadap fase awal Islam di Nusantara, dan signifikansi kontemporeranya bagi masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan historis, penelitian ini menggambarkan transformasi peran masjid, dari penekanan tradisionalnya pada pendidikan menjadi peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, di luar fungsi utamanya sebagai tempat ibadah, masjid telah berevolusi menjadi pusat untuk menyediakan layanan sosial dan ekonomi bagi para jamaahnya, yang mewakili perubahan penting dari peran historisnya. Artikel ini memberikan pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya menilai kembali relevansi dan peran masjid dalam memenuhi berbagai kebutuhan umat Islam. Artikel ini menjadi titik fokus penting untuk merevitalisasi peran masjid dalam menanggapi keberlanjutan sosial-ekonomi dan tuntutan masyarakat kontemporer.

Kata kunci: fungsi masjid, pengajaran Islam, pemberdayaan sosial ekonomi

Abstract: This article explores the evolution of mosque functions, tracing its development from the Golden Age of Islam in the Middle East to its influence on the early phases of Islam in the archipelago, and its contemporary significance for Indonesian society. Employing a historical approach, the paper delineates the transformation of the mosque's role, transitioning from its traditional emphasis on education to a pivotal role in enhancing the social and economic well-being of Muslims. The study's findings indicate that, beyond its primary function as a place of worship, the mosque has evolved into a hub for providing social and economic services to its worshippers, representing a notable departure from its historical role. This article provides a comprehensive understanding of the importance of reassessing the relevance and role of mosques in meeting the multifaceted needs of Muslims. It stands as a crucial focal point for revitalizing the role of the mosque in response to socio-economic sustainability and contemporary societal demands.

Keywords: mosque functions, teaching of Islam, socio-economic empowerment

How to Cite: Mustain, M. (2023). Dinamika Fungsi Masjid di Indonesia: Dari Lokus Pengajaran Islam Ke Pemberdayaan Sosial Ekonomi Umat. *EL-HIKMAH: Jurnal Kajian dan Penelitian Pendidikan Islam*, 17 (2), 109-121. <https://doi.org/10.20414/elhikmah.v17i2.8998>.



Pendahuluan

Pusat-pusat pembelajaran dan kajian Islam mengalami perkembangan sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan geografis sehingga melahirkan beragam institusi sesuai dengan persebaran Islam ke berbagai belahan dunia. Ahmad Syalaby menyebutkan beberapa institusi pendidikan Islam yang lahir sebelum munculnya madrasah, yaitu *Kuttab*, *Manazil Ulama* (Rumah Kediaman Para Ulama'), *Masjid dan Jami*, *Qushur* (Pendidikan Rendah di Istana), *Hawanit al-Warraqa'in* (Toko-toko Buku), *Salunat al-Adabiyah* (Majlis Sastra), *Maktabah* (Perpustakaan), dan *Majelis Muhadharah* (Syalabi, 1973). Proses peralihan institusi pendidikan pra-madrasah ke madrasah, menurut George Makdisi ditandai dengan munculnya *Masjid-Khan* sebagai lembaga transisional dari masjid ke madrasah (Makdisi, 1981, hlm. 24).

Pada era klasik, masjid menjadi istitusi yang memiliki beragam fungsi, mulai dari tempat ibadah ritual, meditasi, diskusi masalah politik, dan tempat pengajaran. Di beberapa masjid yang terkenal, jumlah murid yang belajar dapat mencapai ratusan, bahkan ribuan (Zaimeche, 2002, hlm. 3). Gazalba juga menyebutkan bahwa pada masa Rasulullah dan Era Klasik, selain menjadi pusat peribadatan ritual, masjid juga berfungsi sebagai tempat menuntut ilmu, pembinaan umat, pusat dakwah dan kebudayaan Islam, dan kaderisasi umat Islam (Gazalba, 1962, hlm. 195). Melihat kompleksitas fungsi masjid sebagaimana disebutkan di atas, dapat dikatakan bahwa pada masa itu masjid menjadi pusat peradaban Islam karena di dalamnya tidak hanya berlangsung aktifitas ritual dan sosial-politik, tetapi juga aktifitas intelektual untuk mengembangkan ajaran-ajaran Islam. Namun, seiring dengan dinamika perkembangan kehidupan sosial, politik, dan intelektual masyarakat muslim, fungsi masjid menjadi semakin terbatas. Istana yang didirikan para penguasa Islam mulai menggantikan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan politik dan peradilan. Begitu juga dengan didirikannya madrasah dan universitas, keberadaan masjid sebagai pusat aktifitas intelektual yang melahirkan peradaban mulai tergantikan oleh kedua institusi ini. Kajian-kajian keilmuan, khususnya hukum Islam, beralih ke madrasah dan universitas yang didirikan penguasa Islam saat itu, seperti Nizhamul Mulk yang mendirikan Madrasah Nidzamiyah di berbagai wilayah kekuasaannya, Nuruddin Zakki yang juga mendirikan banyak madrasah di wilayah Damaskus dan sekitarnya, dan penguasa Dinasti Ayyubiyah yang membangun banyak madrasah di wilayah Mesir. Kemudian penguasa Dinasti Fatimiyah mendirikan dua universitas, yaitu Universitas Qarawiyyin di Fes, Maroko pada tahun 859 H. dan Universitas al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 959 H. Selanjutnya di Baghdad juga dibangun Universitas Nizhamiyah oleh Perdana Menteri Nizhamul Mulk pada tahun 1091 H. (Syalabi, 1973, hlm. 111-114).

Dalam konteks sejarah Islam Indonesia, nampaknya keberadaan masjid sebagai institusi pendidikan Islam juga berkembang meskipun tidak sebagaimana yang berlangsung di zaman keemasan klasik di Timur Tengah. Pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, masjid juga difungsikan oleh para penguasa Islam sebagai lembaga

pendidikan untuk mengajarkan dan mendiskusikan masalah-masalah agama, namun tidak memiliki fungsi yang besar sebagaimana masjid-masjid yang dibangun para khalifah dari Dinasti Islam Abad Pertengahan (Abdullah, 1991; Sunanto, 2010; Abdullah, 2012; Yunus, 1985). Apalagi setelah tumbuh institusi pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren, madrasah, dan universitas (al-Jami'ah), maka keberadaan masjid sebagai institusi pendidikan Islam semakin terbatas fungsinya.

Pada era kekinian muncul gagasan-gagasan untuk merevitalisasi fungsi masjid pada aspek-aspek yang lebih kontekstual dengan kebutuhan umat Islam Indonesia saat ini, khususnya terkait dengan kondisi sosial-ekonomi umat Islam yang masih memprihatinkan. Muncul upaya-upaya untuk menjadikan masjid sebagai pusat pemberdayaan umat melalui berbagai program yang dijalankan secara mandiri maupun berkerjasama dengan berbagai *stakeholders* yang ada di wilayah masing-masing. Misalnya dalam bentuk program pengembangan jama'ah (Hidayat, 2015), pengembangan sosio-ekonomi (Musahadi, 2018), literasi keuangan syari'ah (Putri & Firmansyah, 2017), pemberdayaan ekonomi umat (Afif, 2020), dan pengembangan masyarakat (Omar et al., 2019; Mufidah Ch., 2016; Kurnia, Fitriyani & Hudaya, 2018, hlm. 175-179).

Dinamika fungsi masjid yang berlangsung dalam sejarah umat Islam menggambarkan sebuah proses di mana beberapa fungsi yang sebelumnya berpusat pada masjid kemudian bergerak menjauh dan keluar yang kemudian mengendapkan beberapa fungsi pokok yang tetap tinggal dan dijalankan di masjid hingga kini. Tulisan ini berusaha menggambarkan bagaimana sentrifugasi itu berlangsung pada masjid-masjid yang ada di wilayah Timur Tengah pada Era Keemasan Islam, kemudian imbasnya di Nusantara pada periode awal perkembangan Islam, dan hingga pada masa kini di Indonesia.

Fungsi Masjid pada Era Islam Klasik

Sebagai sebuah bangunan, meskipun secara arsitektural memiliki bentuk yang beragam, konsep masjid merujuk pada bentuk bangunan tertentu yang didalamnya terdiri dari beberapa bagian, yaitu *shahn*, *mighrab*, *mimbar*, *kubah*, dan *menara* (Sutarmadi, 2001). Bentuk bangunan masjid mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan kehidupan kaum muslim. Ketika Rasulullah dan para sahabat membangun Masjid Nabawi di Madinah, bentuknya masih sangat sederhana sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi kaum muslim saat itu.

Pada zaman Rasulullah, masjid benar-benar menjadi pusat seluruh aktifitas keagamaan, sosial, politik, dan budaya kaum muslim. Di Masjid Nabawai di Madinah, Rasulullah dan para sahabat, selain melakukan ibadah sahalat, juga menjadikannya sebagai tempat membahas atau membuat hukum, pelatihan tentara Islam, kamp untuk pengiriman tentara ke medan perang, menerima delegasi suku dan negara asing, tempat pendidikan dan universitas Islam, mengadili dan menyelesaikan perselisihan, dan tahanan bagi tawanan pelanggaran hukum. Selain itu Masjid Nabawi juga menjadi pusat distribusi barang

rampasan dari serangan ke berbagai karavan yang dilakukan oleh Nabi dan pasukannya. Di luar fungsi publik sebagaimana disebutkan di atas, Masjid Nabawi adalah juga sekaligus merupakan situs yang menjadi tempat tinggal Rasulullah (Collins, 2011).

Di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar, fungsi masjid secara umum masih sama sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah, kecuali bahwa Masjid Nabawi tidak lagi menjadi situs tempat tinggal (Rasuullah). Perubahan paling besar terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar, di mana beliau membangun membatasi fungsinya hanya untuk beberapa aktifitas, khususnya keagamaan. Untuk kegiatan militer beliau membangun benteng dan barak yang terpisah dari situs masjid sehingga kegiatan kemiliteran tidak lagi berpusat di masjid. Selanjutnya untuk kegiatan perbendaharaan (ekonomi) dan penjara ditempatkan dalam bangunan tersendiri yang terpisah dari situs masjid. Dengan demikian, masjid tidak lagi menjadi basis kegiatan ekonomi dan militer sebagaimana sebelumnya (Collins, 2011, hlm. 13). Fungsi masjid sebagaimana di atas berlangsung sampai pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Bahkan pada saat itu, selain berfungsi sebagaimana yang berlangsung pada masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, masjid juga menjadi tempat kegiatan seni dan budaya, seperti pembacaan syair dan puisi ketika khalifah menerima delegasi asing. Masjid juga menjadi tempat perlindungan dan tinggal para musafir yang melakukan perjalanan jauh (Collins, 2011, hlm. 17).

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, fungsi masjid dalam bidang pendidikan semakin berkembang. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan Tibawi, bahwa asosiasi masjid dengan pendidikan tetap menjadi salah satu ciri utamanya sepanjang sejarah (Tibawi, 1972, hlm. 24). Hal yang kurang lebih sama juga dikemukakan oleh Waardenburg (1965). Ia menyebutkan bahwa semenjak awal didirikannya, masjid adalah pusat komunitas Islam, tempat shalat, meditasi, pengajaran agama, diskusi politik, dan sekolah. Di mana Islam hadir, maka pasti didirikan masjid sebagai pusat diulainya pengajaran dasar-dasar Islam. Dari sinilah kemudian berkembang menjadi tempat belajar yang terkenal dengan jumlah murid yang dapat mencapai ratusan, bahkan ribuan (Waardenburg, 1965, hlm. 98).

Apabila pada masa Nabi masjid menjadi pusat pembelajaran agama, pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, yang dipelajari di masjid mencakup bidang-bidang ilmu nonagama. Selain mempelajari dogma agama dan bahasa Arab, siswa di madrasah (sekolah) juga akan mata pelajaran yang sekarang dikenal sebagai sejarah, geografi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, kimia, fisika, aritmatika, aljabar dan geometri, kedokteran, teknik dan astronomi. Para santrinya terdiri dari laki-laki maupun perempuan yang tidak hanya berasal dari wilayah sekitar masjid, tetapi juga dari luar kota. Di beberapa masjid, di mulai dari masjid di Andalusia, kemudian menyebar ke berbagai di berbagai wilayah Islam saat itu, didirikan perpustakaan untuk mendukung kegiatan pembelajaran (Waardenburg, 1965, hlm. 98).

Dari bukti-bukti sejarah yang dapat ditemukan, Zakaryya Mohamed Abdel-Hady menyimpulkan bahwa masjid bagi kaum muslim memiliki beragam fungsi. Semenjak dari pertama didirikan pada masa Rasulullah sampai zaman keemasan Islam Abad Pertengahan, masjid mempunyai lima fungsi, yaitu menjadi lembaga spiritual dan keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga sosial, lembaga administrasi, dan lembaga pencegahan penyakit kejiwaan (Abdel-Hady, 2010, hlm. 5-10).

Sepanjang abad kejayaan Islam, masjid menjadi simbol yang menggambarkan begitu eratnya hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun dalam perkembangannya, keberadaan masjid sebagai pusat peradaban mulai meredup seiring dengan lahirnya institusi pendidikan Islam madrasah dan universitas. Terjadi sentrifugasi fungsi masjid, di mana sebelumnya menjadi pusat seluruh aktifitas public, mulai dari ritual, spiritual, intelektual, politik, peradilan, dan ekonomi, kemudian berbagai fungsi strategis didistribusikan ke berbagai institusi yang belakangan lahir. Fungsi intelektual diambil oleh madrasah dan universitas, fungsi politik diambil oleh istana, fungsi peradilan diambil alih lembaga peradilan, fungsi ekonomi diambil oleh lembaga ekonomi, seperti baitul mal.

Fungsi Masjid pada Masa Awal Perkembangan Islam di Indonesia

Keberadaan masjid sebagai institusi pendidikan dimulai ketika di berbagai wilayah di Nusantara berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Para penguasa dari kerajaan-kerajaan Islam itulah yang membangun masjid di wilayah kekuasaan mereka. Dalam perkembangan selanjutnya, setiap kesultanan Islam di Nusantara membangun masjid sebagai tempat ibadah, musyawarah, kegiatan keagamaan, sosial, peradilan dan termasuk pendidikan. Masjid negara biasanya disebut masjid agung, dibangun berdekatan dengan istana kesultanan yang dikelola oleh pemerintah. Selain masjid agung, juga dibangun masjid-masjid di pemukiman masyarakat atau di pedesaan dengan ukuran disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Baik masjid agung, maupun masjid di pemukiman masyarakat, selain sebagai tempat ibadah juga difungsikan sebagai lembaga pendidikan masyarakat. Di Kesultanan Aceh Darussalam misalnya, Sultan Iskandar Muda sangat memperhatikan pengembangan agama dan pendidikan dengan membangun Masjid Baiturrahman dan berbagai masjid di pemukiman masyarakat, serta pusat pendidikan tinggi yang disebut dayah (Sunanto, 2010, hlm. 106-107).

Keberadaan masjid sebagai lembaga dan pusat pendidikan pada masa-masa awal perkembangan Islam di Nusantara terekam dalam laporan Ibnu Batutah. Dalam karyanya yang berjudul "Rihlah Ibn Batutah" diceritakan bahwa ketika ia mengunjungi Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1354 ia menyaksikan banyak masyarakat yang mengikuti halaqah yang diadakan oleh sultan di masjid kesultanan setelah shalat Jum'at hingga masuk waktu ashar. Pada saat itu masjid merupakan pusat agama Islam dan tempat berkumpulnya para ulama dari berbagai negeri Islam guna mendiskusikan agama dan masalah keduniawian (Abdullah, 1991, hlm. 110).

Hal yang kurang lebih sama juga berlangsung di Kesultanan Demak, di mana masjid juga menjadi pusat pendidikan agama. Di Kesultanan Demak, Raden Fatah bersama Wali Songo membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat islamisasi dan pendidikan umat Islam. Di samping berfungsi sebagai tempat muzakarah dan sarasehan para wali, juga sebagai tempat para wali memberikan pendidikan dan pengajaran kepada kaum muslimin ketika itu (Abdullah, 1991, hlm. 333). Pelaksanaan pendidikan Islam di Demak memiliki kemiripan dengan pendidikan di Aceh dan daerah lain, yakni dengan membangun masjid di tempat pusat pemerintahan. Di masjid tersebut pendidikan dibina bawah pimpinan seorang ulama atau guru sehingga masjid menjadi pusat pendidikan dan kegiatan dakwah Islam. Begitupun dengan penghulu yang diangkat oleh sultan, biasanya juga melaksanakan pendidikan kepada masyarakat di masjid negara atau masjid agung dan masjid-masjid di pemukiman masyarakat yang dibangun oleh negara maupun masjid swadaya masyarakat (Yunus, 1985, hlm. 14). Pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode halaqah dan debat. Ilmu pengetahuan agama yang diajarkan juga beragam, mulai dari membaca Al-Qur'an, tauhid, bahasa Arab, tafsir, fiqh, hadits, tarikh, akhlak, faraid dan ilmu falaq. Murid yang belajar juga bervariasi mulai tingkat dasar, menengah dan tinggi (Al-Jumbulati, 1991, hlm. 25).

Di Kesultanan Mataram, Sultan Agung memerintah di setiap tingkat pemerintahan di bangun masjid. Masjid-masjid tersebut berada di bawah tanggung jawab pejabat negara yang mengurus masyarakat setempat di tingkat pemerintahan, bahkan dapat dikatakan masjid sebagai kantor pemerintahan yang mengurus agama. Masjid pada masa itu selain sebagai tempat ibadah juga menjalankan fungsi pendidikan (Abdullah, 2012, hlm. 332). Meskipun pendidikan dan pengajaran saat itu tidak dapat diindektifikasikan secara utuh, tingkat pendidikan masa Kesultanan Mataram dapat sejajarkan dengan tingkat-tingkat jabatan keagamaan yang diangkat pemerintah dengan masjid masing-masing. Pendidikan rendah atau dasar ditangani oleh pejabat agama yang dipimpin oleh modin di masjid desa. Tingkat selanjutnya di masjid kewedanaan, lalu tingkat kabupaten dan terakhir masjid agung. Untuk masjid yang dilengkapi dengan asrama, maka bisa disamakan dengan pesantren. Adapun pejabat agama yang menangani pendidikan dan keulamaan digelar seperti kiai anom, kiai sepuh, dan kanjeng kiai (Abdullah, 2012, hlm. 332).

Memfungsikan masjid menjadi pusat pendidikan Islam juga dilakukan para penguasa Islam di berbagai wilayah nusantara. Di pusat Kesultanan Palembang Darussalam juga didirikan masjid agung yang megah yang sering disebut masjid kesultanan. Masjid ini didirikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin I (1724- 1758) sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, sehingga Palembang tumbuh menjadi salah satu pusat keagamaan dan kesusteraan Melayu. Masjid inilah para ulama diserahkan urusan untuk menangani pendidikan kepada masyarakat. Di sekitar masjid ini tinggal para penghulu, imam, khatib, guru agama, para penuntut ilmu dan syekh tarekat. Baik kasus di Jawa maupun di Palembang ini, penghulu yang diangkat tidak hanya mengurus persoalan penerapan

hukum Islam, akan tetapi juga disertai untuk mengurus berbagai persoalan lainnya, termasuk masalah pendidikan dan pengajaran (Abdullah, 2012, hlm. 332-333).

Di Kalimantan Timur, setelah terjadi islamisasi Kerajaan Kutai, penguasa di sana juga membangun masjid di pusat kerajaan sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Islam di wilayah kekuasaannya. Begitu juga di Sulawesi, proses pendidikan dan pengajaran Islam berlangsung di masjid kesultanan. Di Kesultanan Goa, Sultan Alauddin mendirikan masjid di Bantoala yang berfungsi sebagai tempat shalat, pusat pengajian, pendidikan dan pengajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, masjid ini menjadi pusat pendidikan yang sangat kompleks. Dari masjid ini juga ulama besar Makassar, Syekh Yusuf al-Makassari menjalani pendidikan dasar. Adapun pelajaran yang diberikan di masjid ini meliputi fikih, tafsir, hadis, tasawuf, balaghah dan mantiq (Abdullah, 2012, hlm. 334). Selain masjid kesultanan, masjid-masjid di pemukiman atau di pedesaan juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran dasar bagi penduduk di Nusantara pada masa kesultanan Islam. Di samping didirikan oleh pemerintah, banyak masjid di pemukiman didirikan oleh masyarakat muslim dan dikelola secara swadaya. Sebagaimana di sebutkan sebelumnya, masjid di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi sangat berjasa dalam proses islamisasi dan selanjutnya menjadi tempat proses kulturisasi ajaran Islam. Bahkan di Makassar melalui masjidlah mereka mengenal aksara Arab. Islam memperkenalkan huruf Arab untuk tujuan agama dan lain-lainnya. Anak-anak Makassar disebutkan menghabiskan waktu pagi dan malam bersama ulama yang mengajari mereka nilai dan ajaran al-Quran, membaca dan menulis dalam huruf Arab (Reid, 1992, hlm. 264).

Sebagaimana halnya yang terjadi wilayah Kalimantan, setelah terjadi proses islamisasi kerajaan Selaparang di wilayah Lombok, pusat kerajaannya juga bertransformasi menjadi pusat penyebaran Islam. Setelah istana dibangun, berturut-turut didirikan berbagai fasilitas umum, khususnya masjid dan pasar. Masjid yang telah dibangun selanjutnya menjadi pusat pengajaran Islam dan berbagai kegiatan keagamaan, termasuk pengembangan dakwah ke berbagai wilayah sekitarnya (Jamaluddin, 2011, hlm. 79).

Gambaran di atas menunjukkan bahwa selain berfungsi sebagai pusat pengajaran dan penyebaran Islam, masjid yang didirikan para penguasa Islam (Sultan) di atas juga berfungsi sebagai institusi kulturisasi ajaran Islam terhadap masyarakat di Nusantara. Proses itu tidak hanya berlangsung masjid istana atau masjid agung, tetapi juga di masjid-masjid yang dibangun di pemukiman masyarakat, baik yang berada di bawah patronase pemerintah maupun masjid yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat, semua masjid ini menjalani fungsinya dalam bidang pendidikan Islam (Sarkowi & Akip, 2019).

Setelah era kesultanan, fungsi masjid sebagai pusat kajian Islam mulai meredup dan menghilang. Selain karena tidak adanya dukungan politik dari kekuasaan juga disebabkan tumbuhnya institusi pendidikan Islam pesantren, kemudian disusul madrasah dan universitas yang menggantikan fungsi masjid sebagai pusat pengajaran dan pengkajian Islam.

Fungsi Masjid di Indonesia pada Era Kekinian

Pada era kekinian, keberadaan masjid sebagai institusi pendidikan keagamaan masih tetap terjaga, namun bidang yang diajarkan oleh para ulama dan ustadz terbatas pada dasar-dasar ajaran Islam, seperti membaca al-Qur'an, Fiqh, dan Tauhid. Selebihnya, masjid cenderung berfungsi sebagai tempat di mana aspek ibadah dilakukan dan hanya kegiatan pendidikan sesekali terjadi (Abdel-Hady, 2010, hlm. 11).

Secara umum, peran masjid di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam lebih terbatas fungsinya. Hal itu terkait dengan tata politik dan pemerintahan yang berbeda dengan pemerintahan Islam pada Abad Keemasan Islam di Timur Tengah. Fungsi-fungsi yang sebelumnya menyatu dengan keberadaan masjid, kemudian diambil alih lembaga-lembaga baru yang dibentuk oleh pemerintah, seperti kementerian pendidikan yang terpisah, di mana universitas, perguruan tinggi, sekolah, dan kadang-kadang bahkan madrasah berfungsi. Masjid juga cenderung memiliki peran sosial dan kesejahteraan yang lebih sedikit karena ada kementerian terpisah untuk kesejahteraan sosial dan organisasi masyarakat lainnya yang menangani kesejahteraan masyarakat. Pemisahan fungsi yang sama berlaku untuk kementerian kesehatan, administrasi, dan sebagainya (Abdel-Hady, 2010, hlm. 11).

Sebaliknya, di negara-negara di mana Muslim adalah minoritas, masjid telah mengambil peran yang berbeda dan lebih komprehensif. Misalnya, di beberapa tempat masjid menjalankan peran sebagai *community center*. Penelitian terbaru di negara-negara Eropa menunjukkan bahwa masjid merupakan elemen penting dan perlu dalam jaringan sosial umat Islam. Terlebih lagi, dengan dukungan dan infrastruktur yang memadai, mereka memiliki pengaruh positif terhadap sosialisasi dan integrasi umat Islam ke dalam masyarakat barat yang sekuler. Dengan kata lain bahwa selain menjadi tempat berbagai aktifitas keagamaan, masjid juga berkembang menjadi pusat berbagai kegiatan sosial (Abdel-Hady, 2010, hlm. 10-11).

Dalam konteks Indonesia, banyak masjid yang berusaha merevitalisasi peran dan fungsinya dalam bidang-bidang sosial dan ekonomi. Hal itu antara lain didorong oleh semangat untuk mengembalikan fungsi masjid sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi dan Era keemasan Islam Abad Pertengahan. Pada Era Rasulullah sampai Abad Pertengahan Islam, masjid berada pada fungsi idealnya sebagai pusat berbagai aktifitas ritual keagamaan, sosial, ekonomi, politik, dan intelektual. Dua fungsi yang terakhir nampaknya agak sulit untuk diwujudkan, sehingga dalam perkembangannya fungsi sosial dan ekonomi menjadi fokus pilihan untuk lebih memberdayakan masjid. Dengan menjalankan kedua fungsi tersebut juga sekaligus akan dapat lebih mendekatkan masjid kepada kebutuhan umat. Wujud kongkrit program dan kegiatannya bisa beragam sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan geografis masing-masing, seperti pemberdayaan ekonomi jamaah, pemberdayaan masyarakat pinggiran, baik yang dilakukan secara mandiri maupun berkolaborasi dengan stakeholders.

Untuk menjalankan fungsi pemberdayaan umat, antara lain dapat dimulai dengan merekonstruksi isi materi pengajian atau khutbah, sehingga tidak hanya mendorong jama'ah untuk mencapai kesalehan ritual, tetapi juga kesalehan sosial. Hal itu sebagaimana yang dikembangkan di Masjid Kauman Semarang. Narasi khutbah Jum'atnya tidak hanya focus pada membangun kesalehan ritual, tetapi juga pada kesalehan sosial. Hasil identifikasi Musahadi menunjukkan bahwa dari 51 teks khutbah yang disampaikan di Masjid kauman Semarang, 17 teks berisi kesalehan ritual, 8 teks berisi kesalehan sosial, dan 30 teks memadukan antara kesalehan ritual dan sosial (Musahadi, 2018, hlm. 60). Gagasan yang lebih empiris dikemukakan Putri dan Firmansyah (2017) dengan menawarkan sinergi masjid dengan lembaga keuangan syariah. Menurutnya, melalui jama'ahnya, masjid dapat bersinergi untuk menjad agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) yang melayani masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan syariah. Produk Laku Pandai bisa digunakan untuk kepentingan ibadah (Qurban, Umroh, Haji dll), pembelian pulsa dan pembiayaan mikro syariah. Dengan adanya sinergi, maka masyarakat mendapatkan akses terhadap keuangan syariah sehingga akan meningkatkan inklusi keuangan syariah. Pendidikan tentang keuangan syariah pun akan didapatkan melalui kajian, ceramah dan sosialisasi dari berbagai pihak dibantu oleh tokoh agama dan masyarakat dengan berbasis Masjid sehingga akan meningkatkan indeks literasi keuangan syariah (Putri & Firmansyah, 2017). Untuk menjalankan fungsi pemberdayaan ekonomi umat, masjid juga dapat menjadi basis filantropi Islam dengan mengelola zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan hibah. Dana ZISWAH itu yang kemudian dikelola untuk mendukung berbagai program pemberdayaan umat yang dapat dilakukan masjid, seperti beasiswa pendidikan dan pengembangan ekonomi umat (Afif, 2020, hlm. 765-768).

Dalam tataran yang lebih kongkrit, fungsi masjid sebagai basis pemberdayaan masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk program kegiatan yang mendukung peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal itu sebagaimana dikemukakan Kurnia, Fitriyani, dan Hudaya (2018) bahwa masjid dapat menjadi lembaga yang mendukung peningkatan Index Prestasi Manusia (IPM). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masjid adalah salah satu tempat terbaik yang dapat dijadikan sebagai wadah peningkatan IPM sesuai peran dan fungsinya. Hal itu sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar masjid di Kota Mataram yang melakukan kegiatan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, meski belum semua melakukan kegiatan pelayanan kesehatan. Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang selama ini dilakukan hanya sebatas pada hal-hal yang bersifat konsumtif yang belum memasuki tahap pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kurnia, Fitriyani & Hudaya, 2018, hlm. 175-179).

Fungsi pelayanan juga menjadi perhatian utama dalam mendekatkan masjid dengan kebutuhan jamaah di masjid Jogokariyan Yogyakarta. Selain meningkatkan pelayanan spiritual, masjid juga meluaskan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan sosial dan

ekonomi jamaahnya. Layanan spiritual ditujukan untuk menjamin kenyamanan jama'ah dalam menjalankan ibadah ritual, layanan sosial disediakan untuk memenuhi sarana dan prasarana aktifitas sosial jama'ah, dan layanan ekonomi ditujukan untuk membantu jamaah agar mencapai kesejahteraan dalam kehidupan duniawinya. Untuk dapat menjalankan ketiga fungsi tersebut dengan baik, maka pengurus masjid harus mampu menumbuhkan kepercayaan jama'ah dan *sense of belonging* pada masjidnya (Hidayat, 2015, hlm. 83-84).

Menjadikan masjid sebagai pusat pelayanan sosial dan ekonomi juga menjadi orientasi dalam merevitalisasi Masjid Muttaqien di kawasan Pasar Beringharjo (Saputra & Kusuma, 2017). Untuk menjalankan fungsi layanan ekonomi adalah dengan mendirikan lembaga ekonomi mikro berbasis masjid seperti lembaga zakat yang menghimpun dan mengumpulkan zakat, infaq dan shadaqah serta wakaf yang diberikan atau dikeluarkan jamaah untuk kemakmuran masjid. Dari hasil pengumpulan zakat, infaq, shodaqah tersebut pengelola masjid akan membagikannya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Selain itu program Masjid Muttaqien dalam memberdayakan jamaah adalah dengan merekrut jamaah yang belum memiliki atau kehilangan pekerjaan untuk ditempatkan sebagai petugas pengurus harian Masjid seperti penjaga parkir, penjaga toilet dan kamar mandi, penitipan sandal dan sepatu, biro travel ticketing, serta jamaah putri sebagai penjaga ruang laktasi (Saputra & Kusuma, 2017, hlm. 11).

Upaya lain yang dilakukan pengurus masjid adalah mengembangkan perekonomian jama'ah melalui kerjasama yang dilakukan bersama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Yayasan Anissa Swasti (Yasanti). Yasanti merupakan sebuah LSM yang berdiri secara independen untuk menangani masalah kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Kegiatan kerja sama ini diwujudkan dengan pemberian modal bagi buruh gendong di Pasar Beringharjo yang telah giat mengikuti pengajian setiap hari pada penanggalan Jawa wage di Masjid Muttaqien Pasar Beringharjo Yogyakarta. Selain itu kerjasama juga dilakukan melalui kerjasama dengan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Beringharjo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kurang mampu dengan sasaran khusus kelompok Pengajian paguyuban pengayuh becak "Kompak Harjone" pasar Beringharjo Yogyakarta yang dilaksanakan setiap hari sabtu dan minggu ke-2 dan ke-4 dalam setiap bulan (Abdel-Hady, 2010, hlm. 10-11).

Di wilayah rawan bencana, seperti gempa bumi, masjid dapat difungsikan sebagai pusat penyelamatan dari resiko bencana. Dalam beberapa kasus bencana, khususnya gempa bumi yang berskala besar, masjid menjadi tempat penyelamatan korban karena bangunannya tetap berdiri kokoh. Hal itu sebagaimana dikemukakan Gunadi dan Barliana (2021) dalam penelitiannya yang berjudul "Disaster Response Mosque: A Mosque as a Center for The Rescue of The Ummah". Keduanya merujuk pada Masjid Kobe yang dibangun pada tahun 1928. Dalam kasus kasus bencana bom di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945, bangunan Masjid Kobe tetap berdiri kokoh. Tentara Jepang yang berlandung

di lantai dasar masjid dengan senjata yang mereka sembunyikan di sana berhasil selamat dari serangan, dan selanjutnya masjid menjadi tempat perlindungan bagi para korban (Gunadi & Barliana, 2021, hlm. 41). Dalam kasus bencana gempa dan tsunami di Aceh Desember tahun 2004, Masjid Baiturrahman Banda Aceh juga menjadi tempat berlindung oleh masyarakat karena bangunannya yang kokoh dan tahan gempa (Gunadi & Barliana, 2021, hlm. 42).

Namun dalam kasus bencana gempa di Lombok 2018 dan di Palu 2018 banyak masjid yang mengalami kehancuran, sehingga tidak dapat berfungsi sebagai tempat penyelamatan korban bencana. Namun demikian, sifat masjid yang terbuka untuk semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, usia, dan pendidikan adalah modal untuk dapat dijadikan sebagai pusat kegiatan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti penyelamatan manusia untuk mengurangi risiko bencana dengan syarat bangunannya harus dipersiapkan untuk tahan gempa. Selain itu, masjid harus didesain memiliki kesiapan sebagai informasi posko, relawan dan logistik, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penampungan pengungsi, sanitasi pengungsi fasilitas, fasilitas dapur umum, dan fasilitas *trauma healing*. Tidak kalah pentingnya adalah harus menyiapkan pengurus masjid agar memahami tentang kebencanaan (Gunadi & Barliana, 2021, hlm. 45).

Kesimpulan

Paparan di atas menggambarkan bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat seharusnya menjadi pertimbangan dalam upaya merevitalisasi masjid. Berkembangnya berbagai institusi pendidikan Islam, seperti pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam telah menggeser dan membatasi fungsi masjid sebagai pusat keilmuan Islam. Oleh karena itu, masjid harus mampu menjalankan fungsi-fungsi lain selain pelayanan spiritual, agar keberadaannya dirasakan langsung oleh umat bukan hanya pada saat akan menjalankan ibadah ritual saja, tetapi juga dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan sosial dan ekonomi. Studi empiris yang dilakukan beberapa peneliti sebagaimana diuraikan dalam makalah ini menunjukkan bahwa selain menjalankan fungsi pelayanan spiritual, masjid juga dapat menjalankan fungsi pelayanan sosial dan pelayanan ekonomi jamaahnya. Fungsi pelayanan sosial dan ekonomi ini nampaknya menjadi fungsi yang berusaha diperkuat untuk menggantikan fungsi pendidikan yang pernah terjadi dalam sejarah.

Daftar Pustaka

- Abdel-Hady, Z. M. (2010). The Masjid, Yesterday and Today. *Center for International and Regional Studies (CIRS) Georgetown University*, No. 2, 5-10.
- Abdullah, T. (1991). *Sejarah Umat Islam Indonesia*. Jakarta: MUI.
- Abdullah, T. (Ed.). (2012). *Indonesia dalam Arus Sejarah: Kedatangan dan Peradaban Islam*, Jilid 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve.

- Afif, M. (2020). Fungsi Masjid dalam Mengelola Dana Ziswah Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, 3(2), 749-772.
- Al-Jumbulati, A. (1991). *Pokok-pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Rineka.
- Collins, H. (2011). The Mosque as a Political, Economic, and Social Institution 622 – Present (*Syracuse University Honors Program Capstone Projects No. 282*). Retrieved from https://surface.syr.edu/honors_capstone/282
- Gazalba, S. (1962). *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Gunadi, Y., & Barliana, M. S. (2021). Disaster Response Mosque: A Mosque as a Center for The Rescue of The Ummah. *JoDIE – Journal of Development and Integrated Engineering*, 1(1), 37-46.
- Hidayat, W. P. (2015). Social Capital: Strategy of Takmir of Jogokariyan Mosque of Developing the Worshipers. *International Journal of Nusantara Islam*, 3(2), 79-88.
- Jamaluddin. (2011). Islam Sasak: Sejarah Sosial Keagamaan di Lombok (Abad XVI-XIX). *INDO-ISLAMIKA*, 1(1), 79.
- Kurnia, A., Fitriyani, N., & Hudaya, R. (2018). Mosque as a Place to Improve Human Development Index. In *Proceedings of the International Conference on Mathematics and Islam (ICMI 2018)*, 175-179. SCITEPRESS – Science and Technology Publications.
- Makdisi, G. (1981). *The Rise of College: Institution of Learning in Islam and the West*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Mufidah, C. (2016). Revitalization of Mosque Role and Function Through Development of “Posdaya” in the View of Structuration Theory. *Research on Humanities and Social Sciences*, 6(12), 43-51.
- Musahadi. (2018). The Role of Mosque and Khutba in Socio-Economic Development of Indonesia: Lessons from Kauman Mosque in Central Java. *GJAT*, 8(2), 55-66.
- Omar, N., Muda, Z., Yaakob, R., & Maoti, M. (2019). Mosques as an Agent for Community Development in the History of Islam. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(9), 763-772.
- Putri, S. A. M., & Firmansyah, E. J. R. (2017). Optimalisasi Laku Pandai Berbasis Masjid Guna Literasi dan Inklusi Keuangan Syari’ah Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 106-121.
- Reid, A. (1992). *Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Saputra, A., & Kusuma, B. M. A. (2017). Revitalisasi Masjid dalam Dialektika Pelayanan Umat dan Kawasan Perekonomian Rakyat. *Al-Idarah*, 1(1), 9-11.
- Sarkowi, & Akip, M. (2019). Kulturasi Ajaran Islam melalui Sistem dan Lembaga Pendidikan Islam pada Masyarakat masa Kesultanan di Nusantara. *SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 1(2), 36-53.
- Sunanto, M. (2010). *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sutarmadi, A. (2001). *Masjid; Tinjauan Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Manajemennya*. Jakarta: Kalimah.
- Syalabi, A. (1973). *Sejarah Pendidikan Islam* (M. Yahya & M. S. Latief, Trans.). Jakarta: Bulan Bintang.
- Tibawi, A. L. (1972). *Islamic Education*. London: Luzac and Company Ltd.
- Waardenburg, J. (1965). Some Institutional Aspects of Muslim Higher Education and Their Relation To Islam. *NUMEN*, 12(1), 96-138. DOI: 10.1163/156852765X00096
- Yunus, M. (1985). *Sejarah Pendidikan Islam Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Zaimeche, S. (2002). *Education in Islam: The Role of The Mosque*. United Kingdom: Ahmed Salem.